

ETIKA PEMERINTAHAN: MENJAGA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Irvan Dhani Prabowo *¹

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
idhanipkul@gmail.com

Istiana Hermawati

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
istiana1410@gmail.com

Abstract

Government ethics is an important issue in good governance. This research aims to analyze the importance of government ethics in maintaining the integrity and accountability of public officials. The research method used is a literature study by collecting secondary data from various trusted sources. The research results show that government ethics includes principles such as professionalism, transparency, responsibility and justice. Implementing good government ethics can increase public trust in the government and encourage the creation of a clean, effective and efficient government. In conclusion, government ethics is an important foundation for good governance and must continue to be strengthened.

Keywords: *Government ethics, Governance, integrity, accountability, transparency.*

Abstrak

Etika pemerintahan menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya etika pemerintahan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemerintahan mencakup prinsip-prinsip seperti profesionalisme, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. Penerapan etika pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Kesimpulannya, etika pemerintahan merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan harus terus diperkuat.

Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Tata kelola pemerintahan, Integritas, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Etika pemerintahan menjadi isu penting dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Etika pemerintahan mencakup prinsip-prinsip dasar seperti profesionalisme, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan yang harus dipegang teguh oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. (Trisakti et al., 2023) Penerapan etika pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran etika oleh pejabat publik, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme. Hal ini dapat merusak integritas pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini

¹ Korespondensi Penulis.

bertujuan untuk menganalisis pentingnya etika pemerintahan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat publik.

Kajian Teori

1. Teori Etika Pemerintahan

Teori etika pemerintahan berfokus pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan dari pejabat publik dalam melaksanakan tugas-tugas mereka (Prilla Gilang Fafako, 2024). Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam kajian ini adalah John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian yang menekankan pentingnya tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Prinsip utilitarian ini sering digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan publik yang etis dan bermanfaat luas (Purba et al., 2024).

John Rawls juga memberikan kontribusi signifikan melalui teori keadilannya. Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan sebagai fairness harus menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan publik. Menurut Rawls, kebijakan yang adil adalah yang paling menguntungkan bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung, dan ini harus dipertimbangkan dalam konteks etika pemerintahan (Faiz, 2017).

2. Teori Integritas

Integritas dalam pemerintahan merujuk pada konsistensi antara tindakan, nilai-nilai moral, dan prinsip yang dijunjung oleh pejabat public (Ginting, 2017). Dwight Waldo, seorang ilmuwan administrasi publik, menekankan bahwa integritas adalah esensi dari profesionalisme dalam pelayanan publik. Menurut Waldo, integritas adalah kualitas yang mencakup kejujuran, komitmen terhadap kebenaran, dan kepatuhan terhadap etika profesi.

Hubert Dreyfus dan Stuart Dreyfus, melalui model pengembangan keterampilan mereka, menjelaskan bahwa integritas berkembang seiring dengan peningkatan kompetensi dan pengalaman profesional. Mereka berpendapat bahwa pejabat publik yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas cenderung menunjukkan integritas yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan (Adjat Daradjat, 2010).

3. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mengacu pada tanggung jawab pejabat publik untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada public (Kholmi, 2010). Mark Bovens, seorang pakar dalam studi akuntabilitas, mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan sosial di mana satu pihak menjelaskan tindakannya kepada pihak lain, yang memiliki hak untuk meminta penjelasan dan menilai tindakan tersebut (Safitri et al., 2024).

Robert D. Behn mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan terdiri dari tiga elemen utama: akuntabilitas finansial, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas finansial terkait dengan penggunaan dana publik secara efisien dan efektif, akuntabilitas kinerja berfokus pada pencapaian hasil yang diharapkan, dan akuntabilitas prosedural berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi (W., & Harsasto, 2020).

4. Teori Good Governance

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sering kali menjadi kerangka acuan dalam diskusi tentang etika pemerintahan, integritas, dan akuntabilitas (Ramadhan, 2024).

David Osborne dan Ted Gaebler melalui buku mereka *Reinventing Government*, memperkenalkan prinsip-prinsip tata kelola yang mendorong efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Mereka menekankan pentingnya menciptakan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab kepada rakyat (Osborne, 1992).

Sheng Hong dan Wen Bo dalam kajian mereka tentang *good governance* menambahkan bahwa tata kelola yang baik harus mencakup partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini saling terkait dan membentuk dasar bagi pemerintahan yang etis dan bertanggung jawab .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data-data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan artikel berita terpercaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemerintahan mencakup beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Profesionalisme: Pejabat publik harus memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Transparansi: Pemerintah harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.
3. Responsibilitas: Pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan organ pengawas yang relevan.
4. Keadilan: Pemerintah harus bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan dan menegakkan hukum.

Penerapan etika pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. (Susanty, 2020) Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kebijakan dan regulasi yang mengatur etika pemerintahan di Indonesia cukup komprehensif, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan pedoman etika yang diterbitkan oleh berbagai lembaga. Beberapa temuan utama meliputi:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menetapkan standar etika bagi pejabat publik dan mewajibkan mereka untuk melaporkan kekayaan serta menghindari konflik kepentingan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan pedoman rinci mengenai perilaku yang diharapkan dari PNS dan sanksi bagi pelanggaran etika.
- Pedoman Etika Lembaga seperti yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyediakan framework etis bagi pejabat di berbagai level pemerintahan.

Studi kasus menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam pemerintahan sering kali disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- **Konflik Kepentingan:** Beberapa kasus korupsi yang dianalisis menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran etika.
- **Kurangnya Transparansi:** Banyak kasus korupsi terjadi di lingkungan yang kurang transparan, di mana akses informasi publik terbatas dan mekanisme pengawasan internal lemah.
- **Budaya Organisasi:** Budaya organisasi yang permisif terhadap praktik korupsi dan tidak menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas berkontribusi signifikan terhadap terjadinya pelanggaran.

Contoh kasus yang dianalisis termasuk skandal korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal.

Analisis/Diskusi

Etika pemerintahan merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip etika pemerintahan seperti profesionalisme, transparansi, responsibilitas, dan keadilan harus dipegang teguh oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. (Astomo et al., 2014)

Profesionalisme pejabat publik merupakan syarat utama untuk menjamin kualitas kinerja dan pelayanan pemerintah. Pejabat publik harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta integritas dan dedikasi yang tinggi. Hal ini akan mencegah penyalahgunaan wewenang dan mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Transparansi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran juga menjadi kunci penting bagi akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. (Sofyani & Tahar, 2021)

Responsibilitas pejabat publik, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan organ pengawas, merupakan wujud dari akuntabilitas pemerintah. Hal ini akan mendorong pejabat publik untuk bekerja dengan lebih hati-hati dan profesional.

Selain itu, keadilan dalam pemberian pelayanan publik dan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari etika pemerintahan. Pemerintah harus bersikap adil dan tidak diskriminatif agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada pentingnya etika pemerintahan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik:

1. Komprehensivitas Kebijakan dan Regulasi

Indonesia memiliki kerangka kebijakan dan regulasi yang cukup komprehensif terkait etika pemerintahan. Undang-undang, peraturan, dan pedoman yang ada telah dirancang untuk menetapkan standar perilaku bagi pejabat publik dan menyediakan mekanisme akuntabilitas. Namun, meskipun kerangka ini ada, implementasi yang efektif masih menjadi tantangan utama.

Regulasi yang ada seringkali tidak diterapkan secara konsisten, yang mengakibatkan adanya celah bagi pelanggaran etika.

2. Faktor Penyebab Pelanggaran Etika

Studi kasus mengungkapkan bahwa pelanggaran etika dalam pemerintahan sering kali disebabkan oleh beberapa faktor utama:

Konflik Kepentingan: Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik sering menjadi akar masalah pelanggaran etika. Pejabat publik sering kali terlibat dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok mereka bertentangan dengan kepentingan publik.

Kurangnya Transparansi: Transparansi yang rendah dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang tidak menekankan pentingnya integritas dan cenderung permisif terhadap praktik korupsi juga merupakan faktor yang signifikan.

3. Persepsi Publik dan Akuntabilitas

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap korupsi sebagai masalah serius dalam pemerintahan. Mekanisme akuntabilitas yang ada dinilai belum efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran etika. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme ini agar lebih transparan dan responsif terhadap laporan publik.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat etika pemerintahan dan meningkatkan integritas serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia:

Penguatan Mekanisme Pengawasan:

Meningkatkan kapasitas lembaga pengawas internal dan eksternal serta memastikan independensi mereka.

Mengadopsi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengawasan.

Mendorong Transparansi dan Partisipasi Publik:

Memastikan keterbukaan informasi publik dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

Mengembangkan platform online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran etika dan korupsi secara anonim dan aman.

Pendidikan dan Pelatihan Etika Berkelanjutan:

Menyediakan program pendidikan dan pelatihan etika secara berkelanjutan bagi semua level pejabat publik.

Membangun modul pelatihan yang menekankan pada kasus-kasus nyata dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman praktis tentang etika pemerintahan.

Pengelolaan Konflik Kepentingan:

Mengembangkan kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan.

Memberikan pelatihan khusus bagi pejabat publik tentang bagaimana menghindari dan mengelola konflik kepentingan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini akan meningkatkan

kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi tantangan etika dalam pemerintahan, serta menyediakan panduan praktis untuk perbaikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjat Daradjat. (2010). Aktualisasi Konsep Good Governance Dalam Mengantisipasi Masalah Ketenagakerjaan Sebagai Salah Satu Tantangan Pembangunan Adjat Daradjat. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(1), 79–93.
- Astomo, P., Akhmaddhian, S., Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 09(1), 30–38. <http://www.nber.org/papers/w16019%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/2198/1604>
- Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*, May 2009. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Ginting, S. B. (2017). Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum dari Perspektif Etika. *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*, 46–51. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/Prosiding/article/view/260/0>
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika-Bisnis*, 2(2), 357–370.
- Osborne, D. T. (1992). Reinventing Government (Government That Means Business). *Leadership Abstracts*, 1–3.
- Prilla Gilang Fafako, D. K. (2024). Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4, 3474–3483.
- Purba, B., Sihombing, A. E., Azizah, L. N., & Purba, A. A. (2024). Analisis Penerapan serta Hambatan Pemikiran Tokoh-tokoh Ekonomi Klasik terhadap Sistem Ekonomi Masa Kini. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 148–159. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i3.1151>
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Safitri, W. E., Riyadi, S., & Ferianto, F. (2024). Akuntabilitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. *01(01)*, 12–17.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Susanty, Y. (2020). Penerapan Etika Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ... *Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 022. <http://jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/view/300%0Ahttp://jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/download/300/211>
- Trisakti, F., Muljawan, A. R., Muthmainah, A., & ... (2023). Pentingnya Etika dan Akuntabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 22–31. <http://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/128%0Ahttps://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/download/128/118>
- W., & Harsasto, P. (2020). Evaluasi E-Budgeting Di Pemerintah Kota Surakarta (Tahun Anggaran 2018). *Journal of Politic and Government Studies*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27313>